



AKADEMIA

ISSN NO. 1410-1315

VOL. 16 NO.1 FEBRUARI 2012



DITERBITKAN OLEH :
KOPERTIS WILAYAH – I (PROVINSI ACEH – SUMATERA UTARA)



AKADEMIA

ISSN NO. 1410-1315

VOL. 16 NO.1 FEBRUARI 2012

PENGANTAR REDAKSI

Akademia terbitan edisi Pebruari Vol 16 No. 1, 2012 ini menyajikan 8 (delapan) artikel dengan berbagai topik, yaitu 2 (dua) tulisan bidang ilmu ekonomi, 4 (empat) dari bidang ilmu pertanian, 1 (satu) dari bidang ilmu pendidikan dan 1 (satu) bidang ilmu kesehatan.

Arjuniadi, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Jabal Ghafur Sigli, memaparkan hasil kajiannya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kota.

Meldawati, dosen Universitas Methodist Indonesia Medan, melakukan analisis tentang pengaruh ekstrak buah *morinda citrifolia linn* terhadap kualitas, kuantitas sperma dan kadar *malondialdehyde* testis tikus wistar diabetes mellitus.

Rolan Siregar dan Lasminar Siahaan, dosen Fakultas Pertanian Universitas Sisingamangaraja XII Medan memaparkan hasil analisis tentang scarifikasi fisik pada struktur kulit biji untuk merangsang perkecambahan dan pertumbuhan *mucuna bracteata*.

Rahmi Agustina, dosen Universitas Jabal Ghafur Sigli, membahas tentang analisis buku pelajaran biologi terbitan Grafindo Media Pratama karangan M. Salman Akhyar Tahun terbit 2004 edisi 1A.

Theodora MV Nainggolan, dosen Fakultas Pertanian Universitas Sisingamangaraja XII Medan, mengkaji tentang peranan wanita tani dalam perekonomian keluarga.

Nanang Widiyanto, dosen Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komputer Mikroskil Medan, memaparkan hasil kajian tentang penerapan *customer relationship management* dalam mencapai profit perusahaan.

Twenty Liana dan Suparman, peneliti dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Tengah, melakukan kajian tentang analisis hasil beberapa genotipe jagung di lahan kering Barito Utara dan Barito Timur.

Mhd Buhari Sibuea, dosen Kopertis Wilayah I dpk Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, menulis tentang peran akademisi untuk penguatan akses pangan masyarakat dalam rangka revitalisasi agribisnis.

Redaksi berharap pada Akademia berikutnya dapat kembali mempublikasikan tulisan-tulisan yang diangkat dari hasil-hasil penelitian, sehingga menambah kesempurnaan isi Akademia.

Semoga Akademia dapat tampil dan hadir secara konsisten dan menjadi referensi yang bermanfaat bagi seluruh pembaca dan pemerhati ilmu pengetahuan.

Redaksi.

AKADEMIA

ISSN NO. 1410-1315

VOL. 16 NO.1 FEBRUARI 2012

DAFTAR ISI

<i>Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Kota</i> <i>Arjuniadi</i>	1
<i>Pengaruh Ekstrak Buah Morinda citrifolia Linn Terhadap Kualitas, Kuantitas Sperma Dan Kadar Malondialdehyde Testis Tikus Wistar Diabetes Mellitus</i> <i>Meldawati</i>	7
<i>Scarifikasi Fisik Pada Struktur Kulit Biji Untuk Merangsang Perkecambahan Dan Pertumbuhan Mucuna bracteata</i> <i>Rolan Siregar, Lasminar Siahaan</i>	16
<i>Analisis Buku Pelajaran Biologi Terbitan Grafindo Media Pratama Karangan M. Salman Akhyar Tahun Terbit 2004 Edisi 1A</i> <i>Rahmi Agustina</i>	28
<i>Peranan Wanita Tani Dalam Perekonomian Keluarga</i> <i>Theodora MV Nainggolan</i>	36
<i>Penerapan Customer Relationship Management Dalam Mencapai Profit Perusahaan</i> <i>Nanang Widiyanto</i>	41
<i>Analisis Hasil Beberapa Genotipe Jagung Di Lahan Kering Barito Utara Dan Barito Timur</i> <i>Twenty Liana Dan Suparman</i>	49
<i>Peran Akademisi Untuk Penguatan Akses Pangan Masyarakat Dalam Rangka Revitalisasi Agribisnis</i> <i>Mhd. Buhari Sibuea</i>	56

**TIM REDAKSI AKADEMIA
KOPERTIS WILAYAH - I**

Penanggung Jawab
Drs. Sederhana Sembiring, MM.

Redaktur
Drs. Syaiful Bahri, MAP.

Editor
Prof. Ir. Moehammed Nawawiy Loebis, M.Phil., PhD
Prof. Dr. Efendi Barus, M.A
Prof. Dr. Alesyanti, M.Pd., M.Hum
Prof. Dr. Nurhayati, MP
Prof. Dr. Ir. Usman Nasution

Desain
Heriyanto, S.Sos.
Suyono, A.Md

Sekretariat
Drs. Zulkarnain
Syamsul Bahri, SE.
Salahuddin, SH.
Marwidis

PERAN AKADEMISI UNTUK PENGUATAN AKSES PANGAN MASYARAKAT DALAM RANGKA REVITALISASI AGRIBISNIS

Oleh :

Mhd. Buhari Sibuea

(Dosen Kopertis Wilayah I dpk Fakultas Pertanian UMSU Medan)

Abstract

Agricultural development will essentially boils down to how providing the food evenly in all of society, which are easily affordable, guaranteed low prices with a continuous nutrient. Although it is recognized that food also is a commercial commodity, but in the context of food security oriented aspects of community food remains a top priority. Agribusiness revitalization are therefore is the best thing to do in strengthening community food access. But if possible, efforts should be made a breakthrough expansion of domestic and foreign markets to further enhance the bargaining power of food production Indonesia. Synergistically integrated farming, which is supported goodwill from any party related directly or indirectly with food, especially from among the agricultural colleges, departments and non-departmental agencies, local governments, social agencies and the farming community itself, when it runs harmonious and sustainable, in turn, will provide optimal results and the best for the nation and the country of Indonesia. Innovation and competence are generated by the agricultural higher education, will be meaningful if it can be implemented well in the whole of the farmers with the support of relevant institutions with integrated and sustainable manner.

Keywords: Food Access, Agribusiness Revitalization

Pendahuluan

Sektor pertanian dalam arti seluas-luasnya merupakan sektor andalan (*basic sector*) bagi suatu bangsa dan negara seperti Indonesia. Sebab kebutuhan akan bahan pangan, serat, obat-obatan, energi dan sebagian dari bahan baku industri dipasok oleh kegiatan pertanian. Di samping itu, sektor ini merupakan sektor yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dengan berbagai tingkat kemahiran (*skill levels*). Indonesia yang saat ini merupakan dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, senantiasa dituntut untuk menyediakan pangan, sandang, obat-obatan dan lapangan kerja bagi penduduknya. Selain itu, di dalam era globalisasi pasar, daya saing berbagai hasil kerja, termasuk hasil-hasil pertanian harus kuat sehingga mampu bersaing dengan berbagai barang dari negara-negara lain.

Kondisi pertanian Indonesia saat ini sebenarnya telah berkembang bila dibandingkan dengan kondisi pertanian empat dekade yang lalu. Revolusi hijau telah diperkenalkan dan dijalankan dengan berbagai program nasional seperti Bimas dan Inmas yang berkonsentrasi pada tanaman pangan

sehingga dicapai swasembada beras pada tahun 80-an. Namun agaknya setelah itu pembangunan pertanian di Indonesia tidak menunjukkan perkembangan nyata. Bahkan dengan globalisasi pasar, Indonesia dibanjiri berbagai komoditas pertanian impor seperti gandum, beras, kedelai, jagung, kacang tanah, gula pasir, buah-buahan, sayuran, sapi dan produk daging lainnya (Husodo, 2009). Jika hal ini terus berjalan maka ketahanan nasional, terutama di bidang pertanian, menjadi sangat tergantung pada negara lain sehingga eksistensi, harkat dan martabat bangsa Indonesia di masyarakat global menjadi tak bernilai. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi nasional berbasis pertanian merupakan suatu kebutuhan yang masih harus dan wajib dilakukan.

Pengembangan pertanian tidak hanya bertujuan pada pengembangan aspek teknis saja, tetapi juga memerlukan dukungan akademisi dari dunia pendidikan bidang pertanian yang kuat, khususnya pendidikan tinggi. Dalam sistem pendidikan tinggi tidak hanya diajarkan sistem budidaya, tetapi juga pengembangan ilmu, teknologi dan manajemen yang berkaitan dengan bioproduksi

ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian; (2) mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan teknologi dan/atau kesenian dan mengupayakan penguatannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Namun pada kenyataannya tujuan tersebut masih sangat jauh dari pengharapan apalagi diperburuk dengan kondisi lingkungan di Indonesia yang memprihatinkan dengan adanya peningkatan intensitas dan sebaran bencana alam seperti banjir, longsor pada musim hujan serta kekeringan dan kebakaran lahan pada musim kemarau. Ditambah lagi dengan serangan hama dan penyakit yang menyebabkan wilayah pertanian yang gagal panen semakin luas. Selain itu produktivitas lahan per satuan luas dan juga mutunya tidak menunjukkan peningkatan yang berarti. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tinggi pertanian saat ini belum mampu mendorong sektor pertanian dalam arti luas sebagai sektor unggulan (*leading sector*).

Sektor pendidikan secara umum merupakan sektor penting lainnya setelah pertanian. Sektor pendidikan mengemban tugas untuk mengembangkan sumber daya manusia Indonesia agar dapat memiliki dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks), serta mampu mengamalkannya bagi kesejahteraan manusia hingga dapat meningkatkan harkat bangsa Indonesia di masyarakat dunia sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang berperadaban. Oleh sebab itu pendidikan pertanian di Indonesia mengemban tugas untuk dapat mengembangkan dan menerapkan ipteks yang berkaitan dengan pembudidayaan sumber daya alam Indonesia secara lestari serta memproses hasil budi daya dan mendistribusikannya sehingga dapat kesejahteraan manusia, terutama bangsa Indonesia. Dalam usaha pembudidayaan yang lestari maka diperlukan juga pengembangan wawasan ipteks untuk menjaga produktivitas ekosistem atau lingkungan sehingga daya dukungnya bagi kehidupan berkelanjutan (*sustainable*).

Saat ini, sistem pendidikan tinggi pertanian, seperti juga sistem pendidikan tinggi yang lain, berada alam pasar global yang penuh persaingan. Mobilitas tenaga kerja, baik tenaga kerja pendidikan maupun hasil lulusan pendidikan tinggi, dapat melampaui batas-batas negara. Di samping itu, layanan jasa pendidikan tinggi juga dapat melampaui batas-batas negara sehingga perlu dikembangkan sistem pendidikan tinggi pertanian yang mempunyai keunggulan komparatif, terutama dalam

dengan mendayagunakan sumber daya alam yang dimiliki. Bangsa Indonesia sangat berkepentingan atas pengembangan lembaga pendidikan tinggi pertanian sebab Indonesia mempunyai sumber daya alam yang cukup dan penduduk yang banyak.

Lebih jauh dari itu adalah bahwa pembangunan pertanian di Indonesia harus direvitalisasi sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan globalisasi. Karena jika diamati secara seksama, peningkatan produk pertanian yang tercatat dalam statistik cukup *respectable*. Dengan kata lain upaya peningkatan produk cukup berhasil. Hanya saja peningkatan produk tidak selalu diikuti dengan peningkatan pendapatan petani. Bahkan ada kecenderungan pendapatan petani semakin menurun jika dibandingkan dengan peningkatan produk industri. Oleh karena itu paradigma pembangunan pertanian yang hanya meningkatkan produk tanpa meningkatkan pendapatan petani perlu dikoreksi. Paradigma tersebut sudah *mentok* dan sudah menaikan keberhasilan dengan meningkatkan hampir semua komoditas pertanian Indonesia. Oleh karena itu perlu dikembangkan paradigma baru. Dengan paradigma baru tersebut pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan sekaligus masyarakat Indonesia. Paradigma baru itu adalah pendekatan agribisnis.

Demikian pula dalam konteks penguatan akses pangan bagi masyarakat, tentunya memerlukan kiat dan strategi yang sepatutnya harus menjadi pemikiran para *decision making* sehingga pada gilirannya masyarakat mampu memperoleh pangan dengan mudah. Diperlukan terobosan ide dan inovasi dari lembaga-lembaga terkait misalnya dengan lembaga Perguruan Tinggi yang dengan kapasitas dan kapabilitas para akademisinya diharapkan mampu menjawab permasalahan ini. Selama ini terlihat dan terasa bahwa terdapat kesenjangan informasi yang sangat besar antara dunia Perguruan Tinggi dengan keadaan objektif di lapangan bahkan dengan dengan kalangan birokrat dan praktisi sekalipun, seolah-olah masing-masing berjalan sendiri.

Pergeseran Paradigma Pendidikan Tinggi

Tujuan Pendidikan Tinggi menurut Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 1999 adalah (1) meningkatkan kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah

hubungannya dengan pembudidayaan dan pengelolaan sumber daya alam tropika, khususnya Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan paradigma dalam sistem pendidikan pertanian Indonesia dari yang konvensional seperti saat ini menjadi sistem pendidikan yang berkompetensi pada pengembangan ipteks bagi pengelolaan sumber daya alam tropika yang lestari dan kesejahteraan manusia serta diselenggarakan dalam suatu sistem pendidikan yang berorientasi pada mutu. Dalam suatu sistem yang demikian diharapkan dapat dihasilkan sarjana-sarjana yang mempunyai integritas yang tinggi dalam bidang kompetensi yang telah disebutkan di atas dan mempunyai daya saing tinggi di berbagai tataran kompetisi. Sehubungan dengan itu maka perlu dilakukan perubahan pada pola dan fokus pendidikan serta sistem penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi pada penjaminan mutu (*quality assurance*).

Menurut Harvey dan Green (1993), mutu mengandung 5 pengertian yaitu mutu sebagai unggulan (*excellence*), sempurna (*perfection*), konsisten dan tanpa cacat, cocok dengan kebutuhan (*fitness for purpose*), nilai uang (*value of money*), dan sebagai perubahan dari suatu kondisi ke kondisi lain yang lebih baik (*transformation*). Bagi akademisi pertanian Indonesia saat ini mungkin mendefinisikan mutu sebagai kombinasi dari cocok dengan kebutuhan, nilai uang dan perubahan ke kondisi yang lebih baik. Oleh karena itu, sistem pendidikan tinggi pertanian perlu menentukan kompetensi dan menyelenggarakan proses pendidikan sesuai dengan pengertian mutu tersebut.

1. Pendidikan Tinggi Pertanian yang Berkompetensi

Sehubungan dengan potensi sumber daya alam serta kondisi demografi yang dimiliki oleh Indonesia maka dalam menentukan kompetensi lembaga pendidikan tinggi pertanian paling tidak perlu memperhatikan tiga pertimbangan dasar (*basic consideration*), yaitu (a) kepentingan bangsa dan negara; (b) visi akademik (*academic vision*), dan (c) kebutuhan pasar kerja (*market demand*) yang sangat erat kaitannya dengan asupan (*input*) proses pendidikan tinggi. Hubungan ketiga pertimbangan dasar tersebut merupakan segitiga sama sisi karena masing-masing merupakan hal yang mempunyai derajat penting yang sama.

Sebagai negara yang mempunyai sumber daya alam kaya dan jumlah penduduk banyak,

Indonesia memiliki kepentingan besar untuk mengembangkan ketahanan nasional berbasis pada sumber daya yang dimiliki. Beberapa hal yang terkait dengan ketahanan nasional antara lain penyediaan bahan pangan dan energi berbasis sumber daya alam, penyediaan lapangan kerja dan kelestarian fungsi dan mutu lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan ilmu pengetahuan untuk memahami karakteristik dan potensi sumberdaya alam yang dipakai sebagai dasar untuk merakit atau menentukan teknologi bagi pengelolaan sumber daya alam terutama yang berkaitan dengan produksi biomassa. Sehubungan dengan itu, perlu peran lembaga pendidikan pertanian untuk mendidik calon-calon sarjana yang dapat mengelola sumber daya alam untuk produksi biomassa yang bermutu secara lestari bagi pemenuhan kebutuhan bangsa dan negara.

Berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara tersebut maka pendidikan tinggi pertanian ini harus mempunyai visi mengembangkan ilmu-ilmu pertanian Indonesia pada khususnya dan pertanian tropika pada umumnya. Untuk itu, diperlukan pengembangan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pengenalan karakteristik dan potensi sumber daya alam, teknologi dalam pengelolaan sumber daya alam, teknologi penanganan dan pengolahan hasil pertanian, sosial ekonomi, serta manajemen yang berfokus pada pertanian.

Selain aspek kepentingan bangsa dan visi akademik, kebutuhan pasar kerja juga perlu dipertimbangkan. Faktor tersebut harus dipertimbangkan karena kebutuhan pasar akan menentukan jumlah dan mutu calon asupan (*input*) proses pendidikan dan arah kegiatan akademik lain. Tanpa mempertimbangkan aspek pasar, kompetensi pendidikan tinggi akan lemah. Namun, jika hanya aspek pasar yang menjadi pertimbangan terpenting dalam pengembangan pendidikan maka lembaga tersebut hanya akan menjawab persoalan-persoalan sesaat sehingga kewajiban untuk mengembangkan ilmu-ilmu pertanian dan pemenuhan kepentingan bangsa dan negara yang mendasar menjadi terabaikan.

Perkembangan pendidikan tinggi pertanian tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan kegiatan pertanian di masyarakat. Unsur-unsur penentu dalam penentuan konsep kegiatan pendidikan tinggi pertanian harus memperhatikan perkembangan faktor-faktor yang mempengaruhi seluruh kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, arah pendidikan tinggi pertanian perlu mempertimbangkan

menjadi seorang *job seeker*, tetapi mampu menjadi seorang *job creator*.

Untuk dapat menghasilkan seorang *job creator* maka arah kebijakan pendidikan tinggi pertanian harus memperhatikan perubahan kebijakan pembangunan pertanian di Indonesia pada abad 21 sebagai berikut: (1) Dari pembangunan yang berbasis pengembangan komoditas menjadi kesesuaian lahan; (2) Dari peningkatan produksi menjadi peningkatan kesejahteraan petani; (3) Dari peningkatan kuantitas menjadi peningkatan kualitas; (4) Dari pendekatan komoditas menjadi pendekatan agribisnis dalam kaitannya vertikal yang menyeluruh; (5) Dari perencanaan *top-down* menjadi kombinasi *bottom-up* dan *top-down*; (6) Dari kendali pemerintah menjadi peran serta masyarakat / pemberdayaan masyarakat / pemberdayaan masyarakat (bersifat partisipatif).

Lembaga pendidikan pertanian di masa kini dan mendatang harus mempunyai wawasan pertanian modern yang berorientasi kepada globalisasi, penyeragaman standar-standar, persaingan bebas, kesadaran lingkungan, serta kesehatan (*health consciousness*). Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran, para peserta didik tidak hanya diberikan pelajaran yang sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajarinya saja tetapi ilmu-ilmu penunjang proses pembelajaran mereka. Beberapa ilmu penunjang yang dibutuhkan di antaranya sebagai berikut: (a) Penjaminan mutu (*quality assurance*) hasil, yang mempelajari konsep-pengendalian mutu terutama komoditas-komoditas yang menjadi bahan baku makanan, *good manufacturing practices (GMP)*, standar-standar internasional seperti ISO 9000 dsb; (b) Dampak lingkungan, di antaranya mempelajari kesadaran lingkungan dan pengertian konsep *sustainable development*, analisa dampak lingkungan, pengadaban berbagai jenis teknologi *effluent control* dalam berbagai kegiatan agribisnis; (c) Perdagangan komoditas pertanian beserta dasar hukumnya, yaitu mempelajari perdagangan internasional, peraturan / hukum komoditas pertanian, distribusi dan pemasaran produk pertanian di dalam negeri *future trading*, pembiayaan perdagangan (L/C dan lain-lain); (d) Wawasan bisnis, di antaranya berkaitan dengan penguasaan bahasa dunia, penggunaan komputer, *accounting*, dan budaya perusahaan (*corporate culture*).

2. Mengutamakan Pembangunan Pertanian

Ilmu pengetahuan, teknologi dan manajemen bidang pertanian akan dapat diterapkan

kondisi masa kini (*present condition*) dari setiap lembaga pendidikan pertanian yang ada. Demikian juga sumber daya daerah tempat lembaga pendidikan tinggi pertanian tersebut berada, perlu turut dipertimbangkan agar keberadaannya bermanfaat bagi daerah yang bersangkutan. Dengan demikian setiap lembaga pendidikan tinggi pertanian mempunyai warna kekhususan yang mendukung pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Tantangan pendidikan tinggi pertanian yaitu harus mampu menghasilkan lulusan yang paling tidak mempunyai tiga kemampuan utama berikut: (a) Kompetensi akademik, kemampuan metodologis keilmuan dalam rangka penguasaan dan pengembangan ipteks. Kompetensi akademik ini amat penting artinya bagi dihasilkannya pemikiran konsep dan program-program pembangunan inovatif; (b) Kompetensi profesional, wawasan, perilaku, dan kemampuan untuk menerapkan ipteks dalam pembangunan secara profesional. Kompetensi profesional ini diharapkan dapat dimiliki para lulusan perguruan tinggi pertanian sehingga menjadi tenaga dan pakar pembangunan pertanian yang handal; (c) Potensi keceandikitaan, kepekaan para lulusan pendidikan tinggi pertanian terhadap masalah yang dihadapi di lingkungan masyarakatnya, serta wawasan, sikap dan perilaku yang memihak kepada mereka yang masih lemah.

Untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi tersebut di atas, memerlukan reorientasi dan pembahasan dalam sistem pendidikan, termasuk kurikulum yang tepat dan didukung dengan proses belajar mengajar yang bermutu. Keterkaitan dan kerja sama lembaga pendidikan tinggi pertanian dalam dunia usaha dan industri diperlukan untuk lebih menjamin kesesuaian lulusan dengan kebutuhan lapangan. Dengan demikian tujuan pendidikan tinggi pertanian untuk menghasilkan sumber daya manusia yang mempunyai bekal ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan (*skill*) yang menjadikan dirinya selalu berguna dalam menghadapi kompetensi global, perkembangan teknologi beragam dan selalu berubah dapat tercapai.

Dalam kaitannya dengan tujuan tersebut di atas maka lembaga pendidikan tinggi di Indonesia dituntut untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang pertanian sehingga mampu memecahkan permasalahan yang timbul di bidang pertanian. Diharapkan lulusan lembaga pendidikan tinggi pertanian tidak hanya

di lapangan jika berakar dari hasil pengamatan, pemahaman dan pengalaman dari lapangan. Oleh karena itu berbagai aspek akademis, seperti penelitian dan pengajaran akan lebih baik jika diinspirasi oleh kondisi lapangan. Sehubungan dengan itu proses pembelajaran ilmu-ilmu pertanian perlu lebih menekankan pengembangan pengalaman di lapangan terutama bagi strata S1 dan untuk strata S2/S3 perlu membuat penelitian yang berakar dari permasalahan yang ditemui di lapangan (*problem solving oriented*). Hal ini sangat diperlukan untuk menjembatani permasalahan selama ini bahwa sarjana-sarjana pertanian enggan masuk ke lapangan pertanian dan hasil-hasil penelitiannya hanya sampai di perpustakaan lembaga tersebut. Sementara itu, sebenarnya lapangan sangat memerlukan kiprah sarjana-sarjana pertanian untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dari waktu ke waktu (Supiandi Sabiham dan Budi Mulyanto, 2009).

Beberapa masalah pertanian antara lain masalah-masalah peningkatan jumlah produksi, peningkatan mutu hasil, penanganan saat panen dan pengolahan hasil panen, distribusi, pemasaran, pendanaan dan masalah lingkungan agar produktifitas suatu ekosistem lestari. Kerja sama mutualistik antara masyarakat industri, kelompok tani, pemerintah pusat maupun daerah dan lembaga swadaya masyarakat dengan lembaga pendidikan tinggi sangat diperlukan agar dicapai efek pertukaran kerjasama semacam ini, lembaga pendidikan tinggi sangat diperlukan agar dicapai efek pertukaran pengetahuan setara (*effect reciprocal knowledge transfer*). Dalam kerjasama semacam ini, lembaga pendidikan tinggi dapat belajar dari masyarakat, sementara masyarakat dapat belajar dari lembaga pendidikan tinggi. Untuk mencapai hal tersebut lembaga pendidikan tinggi perlu membangun jejaring (*networking*) dengan pihak lain yang kemudian dapat dilanjutkan dengan menjalin kerja sama di bidang misalnya penelitian, pendidikan, konsultasi, dan bahkan membangun hubungan pertemanan (*friendship*). Dengan demikian ruang untuk pembelajaran yang langsung bersentuhan dengan penyelesaian permasalahan yang nyata di lapangan dapat dikembangkan oleh pelaku didik dan peserta didik.

3. Penyelenggaraan Berorientasi Mutu

Pengembangan kompetensi pendidikan pertanian yang berorientasi pada pemecahan masalah pembangunan pertanian yang dijumpai di lapangan

perlu dilakukan dengan mengembangkan jejaring dengan banyak pihak. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa di site ini banyak pihak lain (*stake holders*) yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi pertanian tersebut. Oleh karena itu penyelenggaraan pendidikan tinggi pertanian selayaknya berorientasi pada mutu. Penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi mutu ini mempunyai empat pilar penting yaitu otonomi, akuntabilitas, akreditasi, dan evaluasi.

Keempat pilar mutu ini telah dicoba untuk dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen DIKTI) Depdiknas yang ditandai dengan menjadikan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dalam rangka otonomi Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi yang otonom harus diselenggarakan dengan dengan akuntabel dalam segala tataran, dari tataran kebijakan (*policy*) sampai tataran penyelenggara (*impelimentation*). Akuntabilitas dalam penyelenggaraan ini mencakup juga akuntabilitas dalam pengadministrasian pendidikan dan penelitian, keuangan, penggunaan fasilitas dan sebagainya. Proses evaluasi harus selalu dilakukan untuk mendapatkan masukan bagi perbaikan terus-menerus dalam segala aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh karena itu perlu adanya evaluasi diri (*self evaluation*), penyelenggaraan evaluasi oleh evaluator dari dalam lembaga pendidikan tinggi sendiri (*internal evaluator*), dan evaluator dari luar (*external evaluator*). Setelah sistem penyelenggaraan yang akuntabel dibuat dan diselenggarakan dan proses evaluasi senantiasa dijalankan maka akreditasi perlu dijalankan untuk mendapat pengakuan (*recognition*). Akreditasi dapat diperoleh dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), lembaga profesi, atau badan akreditasi yang bertaraf internasional, seperti *Intrernational Network on Quality Assurance and Accreditation in Higher Education (INQAAHE)* untuk mendapat pengakuan yang lebih luas.

4. Penguatan Akses Pangan Masyarakat

Penyediaan pangan bagi masyarakat adalah merupakan bagian integral dari pembangunan pertanian secara makro yang dalam hal ini juga merupakan bagian tak terpisahkan daripada revitalisasi pembangunan pertanian dengan pendekatan agribisnis. Terutama dalam akses pangan masyarakat, memerlukan inovasi baru yang diharapkan diperoleh dari produk Perguruan Tinggi.

Sebagai seorang akademisi yang memiliki konsep Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat) tentunya *handicap* yang ditemukan di lapangan dalam upaya meningkatkan akses pangan masyarakat seyogyanya dapat diminimalisir. Meskipun pada prakteknya masalah selalu dijumpai, akan tetapi jika konsep ini berjalan dengan baik maka akan segera dapat dicarikan solusinya.

Implementasi daripada peran akademisi atau Perguruan Tinggi dalam aspek pendidikan dan pengajaran tentunya adalah sejauhmana akademisi mampu menyerap atau mendalami ilmu-ilmu pertanian kontemporer dengan jaminan mutu. Apalagi dengan pendekatan agribisnis yang mempunyai ruang lingkup kegiatan yang kompleks yaitu (1) pembuatan dan penyaluran sarana produksi untuk kegiatan budidaya pertanian; (2) kegiatan budidaya atau produksi dalam usaha tani; dan (3) penyimpanan, pengolahan serta distribusi berbagai komoditas pertanian dan produk-produk yang memakai komoditas sebagai bahan baku. Bahkan menurut Saragih (2004) bahwa ruang lingkup pengembangan sistem dan usaha agribisnis di Indonesia sangat luas mencakup berbagai subsistem yaitu (1) pertanian hulu; (2) budidaya; (3) pengolahan hasil pertanian; (4) pemasaran hasil pertanian dan (5) jasa dan penunjang pertanian.

Sementara itu peran akademisi dalam penelitian (*research*) sebenarnya adalah merupakan andalan yang sekaligus menjadi keunggulan komparatifnya. Terutama penelitian atau survey tentang upaya penguatan akses pangan masyarakat harus menjadi skala prioritas. Penelitian-penelitian yang berorientasi kepada pangan dan seluk-beluk terkait dengannya, sepatutnya harus mendapat apresiasi. Meskipun harus diakui bahwa selama ini terjadi jurang informasi yang sangat dalam antara Perguruan Tinggi dengan lembaga lain terutama dalam membicarakan hasil-hasil penelitian. Pihak *stake holder* (pemerintah, swasta dan lainnya) belum melirik produk penelitian Perguruan Tinggi sebagai sesuatu yang wajib dan harus diapresiasi dalam menjalankan aktifitasnya, bahkan terkesan kurang atau tidak percaya. Kondisi ini sudah lama berlangsung dari tahun ke tahun dan sebenarnya dalam hal ini tidak perlu ada pihak yang dipersalahkan.

Peranan akademisi dalam mengimplementasikan hasil-hasil karya dari Perguruan Tinggi adalah melalui pengabdian kepada masyarakat

baik secara langsung maupun tak langsung. Aspek pengabdian ini yang ditunggu oleh masyarakat sebagai bentuk unjuk kerja dari akademisi di tengah-tengah masyarakat, karena mereka telah terlanjur menganggap bahwa para akademisi adalah sebagai penyelamat dan pemikir demi perbaikan masa depan rakyat. Pun demikian halnya dengan dalam upaya pembangunan pangan, akademisi harus mampu memberikan jawaban yang tuntas terutama dalam konteks (1) meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memproduksi pangan secara mandiri; (2) mewujudkan tingkat kecukupan pangan dengan harga terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat; (3) diversifikasi pangan sesuai dengan persyaratan mutu, keamanan dan gizi bagi konsumsi masyarakat; (4) meningkatkan akses pangan bagi masyarakat; (5) meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan; (6) menciptakan kesejahteraan bagi petani; dan (7) melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya pangan nasional.

Berbagai masalah dan tantangan yang dijumpai dalam rangka pemantapan distribusi dan akses pangan terutama di Sumatera Utara antara lain (1) tidak samanya kemampuan dalam memproduksi bahan pangan pokok dan strategis antar daerah/wilayah dan antar waktu; (2) keterbatasan sarana dan prasarana distribusi pangan; (3) belum adanya lembaga pemasaran formal yang berasal, dibentuk dan dikuasai petani produsen; (4) adanya produk perundang-undangan di beberapa daerah, sehingga di sepanjang jalur distribusi sering dijumpai pos-pos pungutan resmi (retribusi) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD); (5) masih adanya gangguan keamanan dan (6) adanya pasokan produk-produk pertanian impor dengan kualitas dan harga yang lebih murah (Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara, 2011).

Solusi terbaik dari permasalahan akses pangan di atas sebenarnya dapat diatasi melalui sinergi harmonis antara pemerintah dengan lembaga-lembaga terkait seperti halnya akademisi dari Perguruan Tinggi yaitu dengan senantiasa menjalin komunikasi dan bertukar informasi. Banyak hasil penelitian yang telah dihasilkan yang menyangkut dengan permasalahan tersebut, yang bisa menjadi alternatif untuk menyelesaikan problem. Meskipun diakui dalam pelaksanaan di lapangan, tidak semudah yang dibayangkan, akan tetapi bilamana sinergi itu dapat diimplementasikan dalam bahasa operasional, pada gilirannya akan dapat diselesaikan dengan baik.

Seperti halnya produk perundang-undangan dari daerah lokal, lembaga pemasaran formal di desa/daerah, produk pangan impor adalah merupakan substansi yang sudah sering di perdebatkan, didiskusikan dan bahkan telah dilakukan survei mendalam oleh kalangan akademisi.

5. Revitalisasi Agribisnis

Pembicaraan mengenai reformasi pertanian Indonesia bukanlah merupakan barang baru, bukan hanya kalangan *agriculturist*, tidak sedikit budayawan, sejarawan bahkan politikus yang memiliki pemikiran dan *concern* terhadap pembangunan pertanian sebagai bagian dari pembangunan bangsa dan Negara Indonesia. Hebatnya, semua partai politik bahkan meletakkan pertanian sebagai salah satu *platform* politik mereka. Itu berarti bahwa pertanian memegang peran sangat penting untuk melepaskan kemelut bangsa dari kekuasaan dan tekanan bangsa-bangsa lain yang berdampak pada kemiskinan. Sayangnya *mindset* tentang pertanian, hampir semua masyarakat termasuk beberapa praktisi dan ahli, dari tahun ke tahun tidak pernah berubah. Pertanian bangsa Indonesia identik dengan produksi gabah dan ketersediaan beras nasional. Perum Bulog yang seharusnya menjadi titik kritis bagi pengembangan sektor *off-farm* pertanian selama ini masih berkuat pada beras, sekalipun telah berubah menjadi Perum. Padahal beras hanyalah sebagian kecil saja dari produk pertanian Indonesia. Karena berorientasi pada beras maka lahirlah derivasi anggapan bahwa pertanian hanya dapat dilakukan di lahan basah (sawah) dan hamparan yang terbuka luas. Hanya sedikit kajian tentang pertanian lahan kering (*dryland*) dan hasilnya ternyata merekomendasikan bahwa pertanian lahan kering masih memerlukan *cost* dan teknologi yang relatif tinggi terutama akibat rendahnya kesuburan tanah dan kurangnya pasokan sumber air.

Pemikiran tentang beras, lahan basah serta hamparan terbuka sebagai sentra pertanian bangsa Indonesia tidak juga luntur meskipun angka disertai bukti nyata telah berbicara. Kalkulasi para ahli statistik dengan dukungan kuat teori Robert Malthus menyatakan pertumbuhan penduduk lebih pesat dibandingkan perkembangan sumber daya pertanian untuk menghasilkan produk-produk pertanian terutama bahan pangan. Bayangkan, dengan tingkat pertumbuhan penduduk 1.4% per tahun, diperkirakan pada tahun 2050 penduduk Indonesia mencapai sekitar 400 juta. Sementara luas panen pada tahun

2000 adalah 11.61 juta hektar dengan laju penurunan luas panen padi sebesar 3.25% per tahun yang berarti pada tahun 2050 menjadi sekitar 2.15 juta hektar. Dengan menggunakan produktifitas padi 8 ton per hektar (angka sangat ideal, kenyataan produktifitas rata-rata padi tahun 2000 sebesar 0.4 ton per hektar) maka suplai padi tahun 2050 adalah 17.2 juta ton. Seandainya data dari World Bank tentang tingkat konsumsi beras per kapita masyarakat Indonesia kita pakai yaitu sebesar 151 kg/kapita/tahun maka dengan jumlah penduduk 400 juta, kebutuhan beras masyarakat Indonesia adalah 34.4 juta ton (Nasution, 2008).

Hal tersebut diperparah dengan semakin menyusutnya luas lahan pertanian di Indonesia akibat industrialisasi dan kebutuhan tempat tinggal dan ruang gerak penduduk Indonesia. Kementerian Pertanian memperkirakan alih fungsi lahan pertanian potensial ke sektor non pertanian rata-rata mencapai kurang lebih 47 ribu hektar per tahun dan sebagian besar terjadi di Pulau Jawa. Beberapa tahun ke depan pun daerah luar Pulau Jawa akan mengalami hal yang sama tentang kebutuhan ruang gerak penduduknya serta pembangunan sektor non-pertanian.

Kenyataan-kenyataan di atas seharusnya dapat mengubah paradigma tentang pertanian ke arah yang lebih kontemporer dan komprehensif. Berbicara tentang pertanian bukan hanya berbicara beras dan sektor *on-farm* yang selalu dikaitkan dengan kondisi ekonomi politik lokal, regional maupun internasional. Pertanian tidak dapat dipisahkan dengan perkebunan, kehutanan, perikanan, teknologi, perdagangan, perbankan, lingkungan, industri dan yang terpenting adalah masyarakat berserta nilai-nilai yang menyertainya. Inilah yang dimaksud dengan **pertanian integratif** yaitu semua unsur pendukung dan pelaku bersinergi menghasilkan suatu kesatuan yang utuh. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan daya kerjasama (*cooperative advantage*) antar-sektor selain terus mempertahankan *comparative advantage* dan meningkatkan *competitive advantages* bangsa Indonesia di tengah globalisasi perdagangan dunia. Semua komponen ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya yang disebut dengan istilah lain suatu sistem agribisnis (dan terdapat di dalamnya berbagai subsistem).

Melihat kondisi Indonesia terkini, penganekaragaman (**diversifikasi**) pertanian pangan sudah seharusnya bukan menjadi wacana lagi. Sudah banyak penelitian dan diskusi yang menyatakan

betapa pentingnya diversifikasi, bukan hanya diversifikasi pangan, tetapi juga diversifikasi pertanian. Dimana dengan pertanian integratif permasalahan yang dihadapi pertanian konvensional selama ini akan dapat diuraikan pemecahannya satu persatu terutama yang menyangkut (1) keterbatasan luas lahan pertaniandan kepemilikan lahan masyarakat yang relatif sangat kecil; (2) ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi dari mulai budidaya sampai pasca panen; (3) pasar; (4) sumber pendanaan; dan (5) kelembagaan.

Penutup

Menuntut peran dari Perguruan Tinggi dengan para akademisinya dalam upaya penguatan akses pangan merupakan kewajiban karena sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sepatutnya hal ini harus mendapat dukungan proaktif dan harmonis terutama dari pemerintah sehingga dapat meminimalisir kesenjangan yang berlaku selama ini. Pada gilirannya dalam rangka revitalisasi agribisnis menuju ketahanan pangan yang berkelanjutan, kendala atau masalah yang selalu dijumpai dapat diurai pemecahannya secara integratif dengan lembaga-lembaga terkait. Memang sangat kompleks, tetapi jika bersama pasti bisa dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah untuk kemajuan organisasi masing-masing pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara. 2011. Terobosan Grand Design Mewujudkan Komitmen Rakyat Tidak Lapar.
- Harvey, L dan Gren, D. 1993. Defining Quality, Assesment and Evaluation in Higher Education.
- Husodo, S. Y. 2009. Membangun Kemandirian Bidang Pangan : Suatu Kebutuhan Bagi Indonesia.
- Nasution, Muslimin. 2008. Diversifikasi Titik Kritis Pembangunan Pertanian. IPB Bogor.
- Saragih, B. 2009. Membangun Pertanian Perspektif Agribisnis dalam Pertanian Mandiri. Penebar Swadaya Jakarta.
- Supiandi Sabiham dan Budi Mulyanto. 2009. Paradigma Baru Pengembangan Pendidikan Tinggi Di Indonesia dalam Pertanian Mandiri. Penebar Swadaya Jakarta.

PETUNJUK PENULISAN NASKAH

Majalah Akademia memuat artikel ilmiah berupa hasil pemikiran, penelitian, peninjauan/ulasan, percobaan berbagai bidang ilmu dan aspek yang terkait dari Kopertis Wilayah I dan Lembaga Pendidikan/Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di luar Kopertis Wilayah I dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia mengikuti Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, sedapat mungkin tidak melebihi 15 halaman.
2. Diketik dengan MS Word, spasi single, Times Roman, ukuran 10 pt. margin atas, kiri dan bawah 1,5 inci dan margin kanan 1 inci. Semua halaman diberi nomor. Ukuran kertas A4.
3. Naskah harus sudah sampai pada redaksi sebulan sebelum jadwal terbit, dalam bentuk disket ukuran 3,5 dan print-outnya.
4. Struktur artikel terdiri atas : Abstrak (100-150 kata) yang ditulis dalam bahasa Indonesia jika artikel ditulis dalam bahasa Inggris, dan sebaliknya. Keywords minimal tiga kata dan maksimal lima kata. Tulisan didahului oleh Pendahuluan, isi/pembahasan, kesimpulan, saran dan daftar pustaka.
5. Redaktur Pelaksana berwenang menyunting naskah tanpa mengubah isi, dan berwenang memutuskan layak tidaknya diterbitkan.
6. Artikel dikirim ke redaksi dengan alamat:
Redaksi Majalah Akademia Kopertis Wilayah I, Jalan Setia Budi
Tanjung Sari Gang Sempurna Medan.